**TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DIDESA NEHAS LIAH BING KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Jonisius

151110013509096

Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. H Juanda, No 80, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123

**ABSTRAK**

**Jonisius,** Tinjauan Tentang Implementasi RPJMDesa Di Desa Nehas Liah Bing Kec.Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur di bawah Bimbingan H. Ahmad Jubaidi, S.Sos.,M,Si dan Wesley Liano Hutasoit, S.Sos.,M.SP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan tentang Implementasi RPJMDes di desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kab.Kutai Timur.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Adapaun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah, Kepala Desa Dan Sekertar Desa di kantor desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Untuk memperoleh data digunakan teknik Observasi, Wawancara, dan metode kepustakaan.

Hasil penelitian, Dari uraian wawancara yang penulis lakukan diatas bahwa dapat dilihat dari Tinjauan Tentang Implementasi RPJMDesa, dengan adanya RPJMDesa maka pembangunan akan berjalan bertahap di dukung dengan adanya SDM yang memadai dan anggaran yang cukup untuk menjalankan pembangunan tersebut sehingga desa tersebut bias lebih maju dan berkembang.

Kata Kunci: Perencanaan

1. **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (social, Ekonomi, akses Pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten.pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan Nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa di tujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mencakup pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju,sejahtera dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal Implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervise dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja.namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Factor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.pembangunan masyarakat desa harus di perbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pembangunan kemampuan sumber daya manusia sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang fositif akan dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya kementrian desayang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya pendampingan pelaksanaan proyekyang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah dana desa, tetapi tetapi yang dimaksud adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan.pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya motivasi yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama untuk membangun pedesaan, disisi lain masyarakat aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upayapembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

Dengan perubahan paradigma yang terjadi pada saat ini, maka sudah sepantasnya, suatu perencanaan tidak lagi berasal dari atas (top down) tetapi sedapat mungkin suatu perencanaan itu harus berasal dari bawah (akar rumput – masyarakat) – bottom up.

Disamping itu, dengan pelibatan semua unsur dan terdokumentasinya semua perencanaan desa, sifat perencanaan itu sendiri tidak lagi bersifat insidentil dan parsial tetapi menjadi sebuah sistem perencanaan yang terintegrasi dan sistematis, komprehensif dan berkelanjutan.Hal tersebut menjadi sangat penting dan mendesak karena pengalaman pada masa lalu, setiap program yang muncul seringkali bukan merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat, tetapi hanya merupakan keinginan dari tingkat yang lebih tinggi dan tidak jarang pula program-program yang muncul dan sampai ke masyarakat sama sekali tidak menyentuh aspek masyarakat secara umum, sehingga masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap program.

Disamping itu, sudah menjadi hal yang biasa dimana masyarakat selalu ditempatkan atau dijadikan objek bukan sebagai pelaku, sehingga sangat wajar pula apabila rasa tanggung jawab akan suatu program menjadi demikian rendah pada tingkat masyarakat atau masyarakat tidak merasa memiliki program.

Saat ini, Tinjauan dalam Implementasi di Kabupaten Kutai Timur dengan program andalannya yang tertuang Program Gerdabangri mencoba mendekatkan programnya ke masyarakat dan pada beberapa bagian memiliki hal-hal prinsip dimana masyarakat tidak lagi sebagai objek tetapi juga pelaku dari program, sehingga harapan akan rasa tanggung jawab dan memiliki program menjadi lebih baik sekaligus sebagai upaya mencapai kesejahteraan bersama.

Gerdabangri adalah suatu program yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah yang akan di bangun dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku atau penggerak program tersebut sehingga dalam pengerjaaan di lapangan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa. Desa Nehas Liah Bing, sebagai desa tertua di wilayah Kecamatan Muara Wahau pada saat ini, mencoba untuk membenah diri dalam menyongsong sekaligus berupaya untuk mendukung program Gerdabangri dan membangun infrastruktur yang layak sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, langkah-langkah penting coba dilakukan yang salah satunya adalah dengan membuat suatu program perencanaan secara partisipatif dan melibatkan semua unsur masyarakat di dalam perencanaan desa dan ide-ide yang di peroleh dari masyarakat yang ikut dalam rapat perencanaan tersebut sehingga pembuat perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan keinginan masyarakat.

Harapan terbesar dari pembuatan rencana desa secara partisipatif ini adalah agar masyarakat juga sama-sama merasa membuat dan mengetahui serta memiliki program dan juga dapat berfungsi sebagai acuan bagi para pemimpin desa dalam melaksakan kegiatan pembangunan desa sekaligus juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Semua perencanaan secara partisipatif tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen resmi desa, yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nehas Liah Bing yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan berisikan, antara lain tentang Kebijakan pembangunan Desa, Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, dan Program (dari SKPD, lintas SKPD dan prioritas kewilayahan) serta merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa.sebelum masuk lebih jauh perlu di ketahui perencanaan itu adalah :

Garth N. Jone, (2007:12) perencanaan merupakan suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas dan di lakukan bersama masyarakat yang hadir di dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang akan di buat untuk mengetahui keadaan yang ada di lapangan yang di ketahui oleh masyarakat.

Lebih lanjut Garth N. Jone, (2007:15) perencanaan merupakan pemikiran rasional berdasarkan fakta – fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan untuk kemudian di terapkan di lapangan nanti sehingga terwujudnya pembangunan yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat desa.

Rustiadi (2008:339) perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin di capai di masa yang akan dating serta menetapkan tahapan – tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh di artikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin di capai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan – tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan di lakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidak pastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah – langkah untuk untuk mencapainya.

Handayaningrat (2007:89) “*planning is the process of preparing a set of decision for actionin the future directed at achieving goals by preferable means”*(perencanan merupakan proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan – kegiatan pada masa yang akan datang den gan di arahkan pada pencapaian tujuan – tujuan melalui penggunaan saran yang tersedia). Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut,

Lebih lanjut Handayaningrat (2007:91) berpendapat bahwa *“planning is a process by which a scientific and technical knowledge is joined to organizedaction”.* Perencanaan merupakan suatu proses dimana pengetahuan ilmiah dan teknik bergabung dengan organizedaction.

Erly suandy (2005:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi – strategi (program), taktik- taktik ( tata cara pelaksanaan program) dan oprasi (tindakan) yang di perlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Siagian (2008:29) perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang aka dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah di tentukan.

Terry (2007:92) perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang di yakini di perlukan untuk mencapai hasil tertentu.

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimana Tinjauan tentang Implementasi RPJMDESA di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur?”
3. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung implementasi RPJM Des di desa Nehas Liah Bing?
4. **METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan secara cermat dan factual. Dengan kata lain peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan akurat terhadap fenomena yang ada di lapangan.

Jadi peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara nyata dan sistematis mengenai Implementasi RPJM Desa Nehas Liah Bing.

1. **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik yang dipergunakan penulis dalam pengupulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Metode kepustakaan / studi pustaka
   1. Data primer
   2. Data sekunder
   3. **Teknik Analisis Data**

Analisis data mengacu pada model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009 : 91) yang menyebutkan langkah-langkah analisis data yakini sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. penyajian data
3. Penarikan Kesimpulan
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

1. Desa Nehas Liah Bing terletak pada Lintang Bujur

2. Batas wilayah Sebelah Utara: Kabupaten Berau sebelah Timur: Kecamatan Kongbeng Sebelah Selatan: Kecamatan Telen Sebelah Barat: Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Bulungan

3. Luas Wilayah 5724.32 km 2

Kecamatan Muara Wahau adalah bagian dari wilayah kabupaten Kutai Timur dengan Luas Wilayah 5724.32 km2. Keseluruhan Wilayah Kec. Muara Wahau yang cukup Luas terdapat di Daratan dan tidak berbatasan langsung dengan laut.ini berarti Kec.muara Wahau Tidak memiliki pantai. Beberapa Wilayahnya dibelah oleh anak sungai dan sungai besar, sedangkan transportasi hampir seluruhnya melalui jalan darat yang merupakan sarana utama bagi masyarakat.

Di sebagian besar wilayahnya udara terasa panas karena dipengaruhi oleh angin laut yang datangnya dari selat Makassar, ditambah lagi dengan adanya pembukaan hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pada daerah pegunungan udaranya terasa lebih sejuk. Curah hujan yang terbanyak terjadi di bulan sekitar 460 mm, dan curah hujan yang terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu sekitar 53mm. Dataran rendah dan Dataran Tinggi terdapat disekitar sungai Besar dan agak kehulu dengan bentuk bergelombang, sedangkan dipedalaman desa Nehas Liah Bing sudah Bergunung-gunung. Desa Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, adalah desa yang didiami oleh masyarakat dayak dari suku Dayak Wehea. Nehas Liah Bing adalah desa pertama di Kalimantan Timur yang merintis upaya pengelolaan hutan desa secara lestari sebelum lahirnya UU Desa dan aturan terkait perhutanan sosial. Nehas Liah Bing adalah salah satu contoh desa di sekitar kawasan hutan yang di sekitarnya sudah berdiri berbagai perusahaan mulai dari izin hutan tanaman industri, HPH, pertambangan dan sawit.

**4.2 Hasil dan Pembahasan**

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa focus penelitian yang diteliti dalam penlitian ini adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Focus Penelitian | Pertanyaan |
| 1 | Kebijakan pembangunan desa | 1. Bagaimana kebijakan pembangunan di desa Nehas Liah Bing? 2. Kebijakan pembangunan desa apa saja yang sudah di laksanakan dan yang belum di laksanakan? 3. Bagaimana kebijakan pembangunan desa di terapkan? |
| 2 | Kebijakan keuangan Desa | 1. Bagaimana kebijakan keuangan di desa Nehas Liah Bing? 2. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan desa Nehas Liah Bing? 3. Bagaimana alokasi penggunaan keuangan desa? 4. Sumber pendapatan keuangan desa Nehas Liah Bing? 5. Apa pengaruh keuangan desa terhadap pembangunan? |
| 3 | Kebijakan umum | 1. Bagaimana kebijakan umum diDesa Nehas Liah Bing? 2. kebijakan umum apasajakah yang telah terlaksana? |
| 4 | Program pembangunan SKPD | 1. Aapakah ada program pembangunan dari SKPD di desa Nehas Liah Bing? 2. Apa jenis program pembangunan tersebut?    1. pembangunan fisik maupun non fisik?    2. sumber Keuangan |
| 5 | 1. faktor-faktor pendukung RPJMDes 2. factor-faktor penghambat RPJMDes | 1. faktor apasajakah yang menjadi pendukung RPJMDes? 2. faktor apasajakah yang menjadi penghambat RPJMDes? |
| 6 | Implementasi RPJMDes di desa Nehas Liah Bing? | 1. Apa sajakah pembangunan yang telah terealisasikan dan pembangunan apa sajakah yang belum terealisasikan? 2. Pengaruh RPJMDes terhadap pembangunan? |

Perlu penulis jelaskan bahwa data yang penulis peroleh adalah data primer dengan teknik wawancara dan juga data sekunder dengan melihat pada dokumen-dokumen atau arsip yang ada di kantor Desa Nehas Liah Bing Kec.Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Dari data yang ada penulis menganalisis data secara kualitatif.

* + 1. **Kebijakan Pembangunan Desa**

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat desa.

* + 1. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

* + 1. **Pembinaan Kemasyarakatan:**

1. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
2. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

**4.3 Pembahasan**

Setelah analisis data dilakukan maka selanjutnya adalah melakukan pembahasan hasil penelitian

1. Kebijakan pembangunan desa

Kebijakan yang dikeluarkan oleh desa sudah sangat baik dan sudah berjalan dengan sesuai dengan rencana. Hal tersebut telah didukung dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti didalam sebuah penelitian peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berada di kantor desa Nehas Liah Bing,dan hasil wawancara yang dilakukan kepada sekertaris Desa(sekdes) beliau mengatakan bahwa kebijakan pembangunan yang di keluarkan oleh desa dan di ketahui oleh Kepala Desa sudah baik.

1. Kebijakan keuangan desa

Kebijakan keuangan desa kebijakan keuangan dilaksanakan sesuai dengan hasil RKPDes yang disepakati dan di tuangkan dalam draf APBDes untuk 1 tahun dan di dalamnya memuat penjabaran dan pelaksanaan APBDes yang di atur melalui PERDES APBDES yang disetujui BPD, pengelolaan kebijakan keuangan dilakukan melalui system yaitu verifikasi dari sekkertaris desa (sekdes) sebagai coordinator, ppkd dan harus disetujui oleh kepala desa sehingga bendahara dapat melakukan pembayaran sesuai permohonan pembayaran dari kaur dan kasi yang membidangi pelaksanaan program dan didalamnya ada persetujuan dari tim pengawas pekerjaan (TPK) untuk pendapatan dana di dapat dari ADD, dana dari pusat: DD,APBD I, APBD II, dan pihak III serta PADes.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa atau membuat perencanaan desa secara partisipatif dan melibatkan seluruh elemen yang ada didalam masyarakat Hal ini dapat terjadi karena adanya tarik ulur kepentingan diantara berbagai pemegang kewenangan.

1. Program pembangunan SKPD

Program pembangunan SKPD yang di lakukan di dalam pembangunan desa adalah pembuatan jalan dan semenisasi serta pemberdayaan SDM yang ada di desa Nehas Liah Bing agar SDM di desa tersebut meningkat sehingga di lakukannya pemberdayaan Manusia

1. Factor pendukung dan penghambat

Factor yang menjadi pendukung di dalam perencanaan RPJMDesa Nehas Liah Bing yaitu keterlibatan masyarakat desa dan cara pandang dalam membuat program pembangunan SDM. Dan keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan desa itu sendiri dan pada saat rapat adanya ide-ide atau gagasan yang di usulkan oleh masyarakat yang menjadi peserta di dalam pembuatan RPJMDesa tersebut sehingga pada saat pengimplementasi di lapangan maka akan tepat sasaran dan tau apa yang di lakukan pada saat di lapangan nanti.dan factor penghambat di dalam RPJMDEs yaitu kurang nya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan RPJMDes dan kurangnya pemahaman tentangb RPJMDesa.

1. Implementasi RPJMDEs di Desa Nehas Liah Bing

Implementasi RPJMDesa Nehas Liah Bing yang di lakukan di desa tersebet pembangunan fisik yang berupa:

1. pelayanan administrasi kepada masyarakat
2. pembuatan rumah layak huni di tahun sebelumnya kepada masyarakat yang tidak mampu.
3. Pembuatan WC atau toilet bagi masyarakat yang tidak mampu.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat : 3 posyandu desa dan 1 polindes
5. Mensosialisasikan dan membantu masyarakat untuk wajib memiliki data kependudukan (KK dan KTP).
6. Pembinaan kepada karang taruna “petkuk sang” Nehas Liah Bing melalui bantuan perawatan lapangan olah raga.
7. Pembinaan seni dan budaya melalui bantuan alat kesenian dan pengadaan pelatih kesenian dan pengadaan pelatih seni musik dan seni tari.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
9. Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan adat istiadat
10. Melestarikan budaya wehea
11. Meningkatkan kualitas kemasyarakatan melalui study atau pelatihan
12. Kebebasan berinovasi untuk menciptakan karya seni.

**V.PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan maka dapat disimpulkan.

* + - 1. Kebijakan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dipilih dalam perencanaan pembangunan desa yang mencakup seluruh aspek kiehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraann bagi masyarakat.
      2. Kebijakan keuangan desa keuangan desa di pegang oleh bendahara desa dan berkoordinasi dengan kepala desa dan Sekertaris desa sehingga pengeluaran di dalam pembangunan tepat sasaran dan sehingga pengeluaran tidak membengkak dan tidak merugikan desa dan masyarakat untuk membangun desa.
      3. Kebijakan umum semua unsur dan terdokumentasinya semua perencanaan desa, sifat perencanaan itu sendiri tidak lagi bersifat insidentil dan parsial tetapi menjadi sebuah sistem perencanaan yang terintegrasi dan sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi sangat penting dan mendesak karena pengalaman pada masa lalu, setiap program yang muncul seringkali bukan merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat, tetapi hanya merupakan keinginan dari tingkat yang lebih tinggi dan tidak jarang pula program-program yang muncul dan sampai ke masyarakat sama sekali tidak menyentuh aspek masyarakat secara umum, sehingga masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap program.
      4. Program pembangunan SKPD sangat penting didalam pembangunan desa Nehas Liah Bing untuk mengaplikasikan berbagai program dan persoalan-persoalan terkait dengan program perencanaan pembangunan daerah sebagai wujudnyata dari tanggung jawab pemerintah desa.
      5. Faktor pendukung dan penghambat factor pendukung suatu pembangunan adalah dengan adanya keterlibatan masyarakat di dalam perewncanaan pembangunan tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar begitu pula pendaan suatu pembangunan yang akan di lakukan. Sedangkan yang menjadi factor penghambat suatu pembangunan adalah kurang nya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala desa dengan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri
      6. Implementasi RPJMDesa penerapan yang di lakukan di lapangan berupa pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan fasilitas yang di perlukan di desa tersebut.
  1. **Saran**

Setelah hasil penelitian dilakukan maka penulis memberikan beberapa saran untuk desa Nehas Liah Bing terkait Tinjauan Tentang Implementasi RPJMDesa. Sebagai berikut:

Perrlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat di laksanakan secara simple dan mudah dipahami oleh perangkat desa dan masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

Pemerintah desa perlu mengoptimalkan tahap musyawarah pramusdes terutama kegiatan indentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya desa mempunyai data tentang potensi,masalah dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini ju

**DAFTAR PUSTAKA**

Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, 2003 *metodelogi Penelitian Sosial*,Bumi Aksara, Bandung.

Usman, Husain 2006 Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta.

*Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.*

*\*Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press.*

*\*Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta :  PT. Elex Media Komputindo.*

*Sugiyono, 2005 Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung*

Wahab, Abdul solichin 2004. *Analis kebijaksanaan: Dari Formulasi ke implementasi. Kebijakan Negara*, Jakarta:bumi Aksara

Todara, M dan Smith, S. 2011. *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm: 19.

Wicaksono, Andri. 2016. *Konsep Dasar IPS.* Yogyakarta: *Penerbit Garudhawacahlm: 347-349.*

Hayati, dkk. 2006. *Ilmu Pengetuan Sosial: Geografi untuk SMP dan MTs Kelas VIII 2*. Jakarta: Erlangga. Hlm: 63-67

Rustiadi, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 119-120.

Mulyono, Widjajanti. 2016. *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm: 22-25.

(Gart N. Jone, perencanaan , 2007)

(Rustiadi, 2008)

(Handayaningrat, 2007)

Ahmad Shukri Md Nain. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan.* Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia Hlm: 309-310

Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Retrieved from

Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Retrieved from

Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmu Administrasi Publik,

Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

<http://www.berdesa.com/tahapan-penyusunan-rpjmdes-dan-rkpdes/>

<https://bumdes.id/2017/09/apa-itu-rpjm-desa/>

<https://www.google.com/search?q=Pembangunan%20adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla>

<http://www.berdesa.com/pengertian-desa-yang-harus-dipahami-warga-pedesaan/>